

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023**



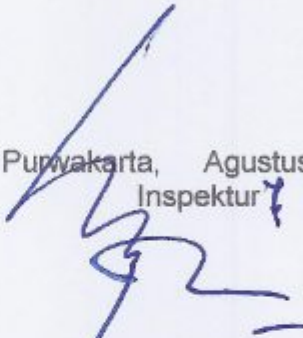
**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Rencana Kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Perubahan Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Perubahan Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Agustus 2023
Inspektur


Ir. H. Murhidayat, MM,CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19640515 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	12
2.1 Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	12
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2023.....	21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	24
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	24
BAB IV PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	13
2.2	Peta Jabatan Inspektorat	21
3.1	Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan prinsip memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, tetap mengacu pada rencana tata ruang dan dilaksanakan secara bersama semua pemangku kepentingan dalam bingkai satu kesatuan.

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Profesional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan

pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang lebih disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yaitu untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksud untuk menjabarkan perubahan rencana pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif

serta prakiran maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
- b. Terwujudnya aparatur yang bersih, akuntabel, transparan, profesional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan serta pencegahan dini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
- c. Tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
- d. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu selama lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan Renja ini, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**
Bab ini memaparkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- BAB IV : PENUTUP**

BAB II
EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan target tahun ke 1 dari periode Renstra Tahun 2018-2023. Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan II, Realisasi pada program dan beberapa kegiatan belum tercapai sesuai target kinerja yang telah dircalisasikan dan ada juga beberapa kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak 100%. Evaluasi capaian atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Triwulan II yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2023 (sesuai DPA)		Realisasi Triwulan II Tahun 2023			Selisih	Ket		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target			Pagu Indikatif	
6	Unsur Pengawasan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01	Inspektorat Daerah		Purwakarta		31.600.863.503	Purwakarta		13.567.670.372	18.033.193.131	42,93	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Purwakarta		26.291.397.003	Purwakarta		12.051.069.372	14.240.327.631	45,84	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Purwakarta		26.402.900			26.395.500	7.400	99,97	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	5 Dokumen	26.402.900	Purwakarta	5 Dokumen	26.395.500	7.400	99,97	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta		21.599.973.413	Purwakarta		10.612.370.721	10.987.602.692	49,13	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima	Purwakarta	65 org/bulan	21.557.913.413	Purwakarta	65 org/bulan	10.605.121.221	10.972.792.192	49,15	

6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Laporan	22.060.000	Purwakarta	0	7.249.500	14.810.500	32,86
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Purwakarta		9.600.000	Purwakarta	0	0	0	0
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Purwakarta	1 laporan	9.600.000	Purwakarta	0	0	0	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta		328.256.000	Purwakarta		114.361.000	213.895.000	34,84
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	33 orang	328.256.000	Purwakarta	33 orang	114.361.000	213.895.000	34,84

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	Purwakarta	1.598.616.730	Purwakarta	422.073.914	1.176.542.816	26,40
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Purwakarta	64.256.200	Purwakarta	56.079.000	8.177.200	87,27
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Purwakarta	819.296.900	Purwakarta	0	819.296.900	0
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Purwakarta	103.556.200	Purwakarta	60.104.000	43.452.200	58,04
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Purwakarta	236.538.500	Purwakarta	157.750.500	78.788.500	66,69
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Purwakarta	128.108.930	Purwakarta	40.356.500	87.752.430	31,50
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Purwakarta	94.000.000	Purwakarta	46.000.000	48.000.000	48,94

6.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 Laporan	152.860.000	Purwakarta	0 Laporan	61.783.914	91.076.086	40,49
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Purwakarta		2.344.547.960			835.597.337	1.508.950.623	35,64
6.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	Purwakarta	12 Laporan	122.682.000	Purwakarta	6 Laporan	45.240.472	77.441.528	36,88
6.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diselesaikan	Purwakarta	12 Laporan	2.221.865.960	Purwakarta	5 Laporan	790.356.865	1.431.509.095	35,57
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Purwakarta		384.000.000	Purwakarta		40.270.900	343.729.100	10,49
6.01.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Purwakarta	25 Unit	287.500.000	Purwakarta	5 Unit	11.005.900	276.494.100	3,83

6.01.01.2.09.02	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	Purwakarta	25 Unit	60.000.000	Purwakarta	1 Unit	65.000	59.935.000	0,11
6.01.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	50 Unit	36.500.000	Purwakarta	40 Unit	29.200.000	7.300.000	80,00
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang Telah Dilaksanakan, Jumlah Diklat yang telah Dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas	Purwakarta		3.759.900.000	Purwakarta		1.190.680.000	2.569.220.000	31,67
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan		Purwakarta		3.407.200.000	Purwakarta		1.106.520.000	2.300.680.000	32,48

	Pengawasan Internal		Purwakarta	1 Laporan	1.129.450.000	Purwakarta	0 Laporan	577.220.000	552.230.000	51,11
6.01.02.2.01.0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Laporan	1.129.450.000	Purwakarta	0 Laporan	577.220.000	552.230.000	51,11
6.01.02.2.01.0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Laporan	1.043.850.000	Purwakarta	0 Laporan	435.550.000	608.300.000	41,73
6.01.02.2.01.0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Purwakarta	1 Laporan	84.700.000	Purwakarta	0 Laporan	79.650.000	5.050.000	94,04
6.01.02.2.01.0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Purwakarta	1 Laporan	24.200.000	Purwakarta	0 Laporan	1.510.000	22.690.000	6,24
6.01.02.2.01.0 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Purwakarta	1 Laporan	538.300.000	Purwakarta	0 Laporan	0	538.300.000	0
6.01.02.2.01.0 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Purwakarta	5 Dokumen	586.700.000	Purwakarta	1 Dokumen	12.590.000	574.110.000	2,15

6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan APIP	Purwakarta	Purwakarta	352.700.000	Purwakarta	84.160.000	268.540.000	23,86
6.01.02.2.02.01	Pengangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	Purwakarta	Purwakarta	21.000.000	0 Laporan	1.500.000	19.500.000	7,14
6.01.02.2.02.02.18.08	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jml laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	Purwakarta	331.700.000	1 Laporan	82.660.000	249.040.000	24,92
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Purwakarta	Purwakarta	1.549.566.500		325.921.000	1.223.645.500	21,03
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Purwakarta	Purwakarta	1.549.566.500		325.921.000	1.223.645.500	21,03
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jml perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	Purwakarta	1.125.031.500	20 Perangkat Daerah	325.921.000	799.110.500	28,97

6.01.03.2.02.0 2	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	31.200.000	Purwakarta	0 Perangkat Daerah	0	31.200.000	0
6.01.01.2.02.0 4	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi akan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	393.335.000	Purwakarta	0 Perangkat Daerah	0	393.335.000	0

2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2023

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023 pada Triwulan II adalah:

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan) yang diperiksa.
2. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Adapun jumlah aparatur pengawas Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Peta Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Peta Jabatan Inspektorat

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
1.	Inspektur	14	1	1	0
2.	Sekretaris	12	1	1	0
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	12	1	1	0
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	12	1	1	0
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	12	1	1	0
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12	1	1	0
7.	Inspektur Pembantu Khusus	12	1	1	0
8.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Madya	11	4	8	-4
9.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Muda	9	4	14	-10

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
10.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Pertama	8	6	20	-14
11.	Auditor Utama	14	1	1	0
12.	Auditor Madya	12	7	8	-1
13.	Auditor Muda	9	11	24	-13
14.	Auditor Pertama	8	6	24	-18
15.	Auditor Penyelia	8	3	6	-3
16.	Auditor Mahir	7	0	8	-8
17.	Auditor Terampil	6	2	10	-8
18.	Perencana Ahli Muda	9	1	1	0
19.	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
20.	Analisis monitoring, evaluasi dan pelaporan	7	2	2	0
21.	Pengelola monitoring dan evaluasi	6	1	2	-1
22.	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
23.	Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
24.	Kasubbag. Keuangan	9	1	1	0
25.	Bendahara	7	1	1	0
26.	Penata Keuangan	7	0	2	-2
27.	Pengelola Keuangan	6	0	3	-3
28.	Pengelola Akuntansi	6	1	1	0
29.	Pengadministrasi Keuangan	5	2	3	-1
30.	JF Analisis SDM Muda	9	0	1	-1
31.	JF. Analisis SDM Pertama	8	0	1	-1
32.	Pengelola Kepegawaian	6	2	2	0
33.	JF. Arsiparis-Pelaksana	6	0	1	-1
34.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	2	2	0
35.	Pranata Kearsipan	6	0	1	-1
36.	JF. Pranata Komputer/Pelaksana	6	0	1	-1
37.	Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
38.	Pengadministrasi Umum	5	2	3	-1
Jumlah		-	67	134	-80

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah :

1. Mengajukan untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP baik melalui penerimaan CPNS maupun melalui Inpassing.
2. Pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan jadwal pelatihan dari BPKP
3. Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam pelatihan Investigasi, PKKN maupun *Fraud Control Plan* sehingga diharapkan APIP mampu menyusun kebijakan terkait percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Menyusun kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang masih dipandang belum memadai, misalnya peningkatan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pelatihan maupun Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka Peningkatan kualitas pengawasan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja. Pencapaian Renstra dan Visi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang pada RKPD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RKPD Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kinerja dari dua program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Perubahan RKPD, dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terdapat 3 program, 10 kegiatan an 28 Subkegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundang yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Inspektorat Daerah	Indikator	APBD Murni Tahun 2023 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2023			Selisih	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%
6.01			Purwakarta		31.600.863.503	Purwakarta		32.431.993.675	831.130.172	2,63
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Purwakarta	B opini, 90 persen	26.291.397.003	Purwakarta	B opini, 90 persen	26.291.397.003	831.130.172	3,16
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Purwakarta		26.402.900			26.402.900	0	0
.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	5 Dokumen	26.402.900	Purwakarta	5 Dokumen	26.402.900	0	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan		Purwakarta		21.599.973.413	Purwakarta		21.599.973.413	0	0

6.01.01.2.02.01	Perangkat Daerah Penyediaan gaji tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Purwakarta	65 org/bulan	21.557.913.413	Purwakarta	65 org/bulan	21.557.913.413	0	0
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Laporan	22.060.000	Purwakarta	1 Laporan	22.060.000	0	0
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah		Purwakarta		9.600.000	Purwakarta		9.600.000	0	0
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jml laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 laporan	9.600.000	Purwakarta	1 laporan	9.600.000	0	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta		328.256.000	Purwakarta		608.256.000	280.000.000	85,30

6.01.01.2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jml pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purwakarta	33 orang	328.256.000	Purwakarta	33 orang	608.256.000	280.000.000	85,30
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwakarta		1.598.616.730	Purwakarta		2.128.583.730	529.969.000	33,15
6.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jml paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	Purwakarta	1 paket	64.256.200	Purwakarta	1 paket	139.265.200	75.000.000	116,70
6.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pelayanan Kantor yang disediakan	Purwakarta	3 paket	819.296.900	Purwakarta	3 paket	819.296.900	0	0
6.01.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Purwakarta	1 paket	103.556.200	Purwakarta	1 paket	178.556.200	75.000.000	72,42

6.01.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	3 paket	236.538.500	Purwakarta	3 paket	366.538.500	130.000.000	54,96
6.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jml paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan	Purwakarta	1 paket	128.108.930	Purwakarta	1 paket	228.108.930	100.000.000	78,06
6.01.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jml laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purwakarta	3 Laporan	94.000.000	Purwakarta	3 Laporan	144.000.000	50.000.000	53,19
6.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 Laporan	152.860.000	Purwakarta	1 Laporan	252.820.000	100.000.000	65,42
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Purwakarta		2.344.547.960			2.365.709.132	21.161.172	17,25
6.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jml laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	Purwakarta	12 Laporan	122.682.000	Purwakarta	12 Laporan	143.843.172	21.161.172	17,25

6.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diselesaikan	Purwakarta	12 Laporan	2.221.865.960	2.221.865.960	0	0
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Purwakarta		384.000.000	384.000.000	0	0
6.01.01.2.09.0 1	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	25 Unit	287.500.000	287.500.000	0	0
6.01.01.2.09.0 2	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Purwakarta	25 Unit	60.000.000	60.000.000	0	0

	Pemerintah Daerah	Pengawasan Pemerintah Daerah											
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	Purwakarta	1 Laporan	84.700.000	Purwakarta	1 Laporan	84.700.000	0	0			0
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Purwakarta	1 Laporan	24.200.000	Purwakarta	1 Laporan	24.200.000	0	0			0
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Purwakarta	1 Laporan	538.300.000	Purwakarta	1 Laporan	538.300.000	0	0			0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Purwakarta	5 Dokumen	586.700.000	Purwakarta	5 Dokumen	586.700.000	0	0			0
6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan Dengan		Purwakarta		352.700.000	Purwakarta		352.700.000	0	0			0

6.01.02.2.02.01	Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	Purwakarta	1 Laporan	21.000.000	Purwakarta	1 Laporan	21.000.000	0	0
6.01.02.2.02.02.18.08	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jml laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	1 Laporan	331.700.000	Purwakarta	1 Laporan	331.700.000	0	0
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Purwakarta		1.549.566.500	Purwakarta		1.549.566.500	0	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Purwakarta		1.549.566.500	Purwakarta		1.549.566.500	0	0
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	jml perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	20 Perangkat Daerah	1.125.031.500	Purwakarta	20 Perangkat Daerah	1.125.031.500	0	0

6.01.03.2.02.0 2	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	31.200.000	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	31.200.000	0	0
6.01.01.2.02.0 4	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penegakan Integritas	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	393.335.000	Purwakarta	10 Perangkat Daerah	393.335.000	0	0

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RKPD Perubahan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Kabupaten Purwakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Scmoga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sehingga Visi dapat diwujudkan dengan baik.

Purwakarta, Agustus 2023

INSPEKTUR 

***Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE**
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640515 199203 1 008